



Permasalahan guru pendidikan agama islam dalam pembelajaran di sekolah minoritas muslim

Sabilla Hidayani Br Tarigan^{1*)}, Ali Imran Sinaga¹, Solihah Titin Sumanti¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara¹

*) Correspondence Author address e-mail: sabillahidayani04@gmail.com

Abstract: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam tantangan yang dihadapi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar negeri yang berada di lingkungan minoritas Muslim di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi selama periode Januari hingga April 2025 pada 14 sekolah dasar di Kecamatan Tiganderket dan Payung. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif berdasarkan sebaran guru PAI dan aksesibilitas peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 85% guru PAI mengalami keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran, sementara sekitar 78% menyatakan kurangnya dukungan kelembagaan dan minimnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan keagamaan. Selain itu, motivasi belajar siswa Muslim yang berstatus minoritas sering kali rendah akibat tekanan sosial dan keterbatasan lingkungan. Meskipun demikian, guru PAI tetap menunjukkan dedikasi tinggi yang ditunjukkan melalui indikator seperti frekuensi keterlibatan dalam kegiatan keagamaan di luar sekolah (rata-rata 3-4 kegiatan per minggu), komitmen dalam menyusun media pembelajaran alternatif, serta konsistensi membimbing siswa di luar jam pelajaran formal. Mereka juga memainkan peran ganda sebagai pengajar, pembina keagamaan, dan tokoh masyarakat. Strategi adaptif yang diterapkan meliputi pendekatan kontekstual, integrasi nilai Islam dalam kegiatan harian siswa, serta pemanfaatan media sederhana untuk menjangkau keterbatasan sarana. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas guru melalui pelatihan kontekstual berbasis lingkungan multikultural, penyediaan bahan ajar digital dan kolaboratif, serta peningkatan sinergi antara sekolah, Kementerian Agama, dan komunitas lokal. Dukungan kebijakan yang lebih spesifik dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan pendidikan agama Islam yang bermakna dan relevan di wilayah mayoritas non-Muslim seperti Kabupaten Karo.

Keywords: Guru Pendidikan Agama Islam, sekolah minoritas Muslim, pembelajaran agama, pendidikan multikultural

Article History: Received on 6/5/2025; Revised on 1/6/2025; Accepted on 20/6/2025; Published Online: 30/6/2025.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) memegang peranan penting dalam membentuk karakter, moral, dan nilai-nilai spiritual peserta didik. Namun, pelaksanaan PAI di daerah dengan populasi muslim minoritas menghadapi tantangan yang tidak ringan, baik dari aspek pedagogis, kultural, maupun struktural. Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara

merupakan salah satu wilayah di mana umat Islam berada dalam posisi minoritas di tengah dominasi masyarakat Kristen. Dalam konteks ini, guru PAI tidak hanya menjalankan fungsi edukatif di dalam kelas, tetapi juga berperan sebagai agen dakwah dan penjaga identitas keislaman di tengah lingkungan yang tidak selalu mendukung keberadaan mereka secara institusional maupun sosial. Hal ini menempatkan guru PAI pada posisi yang kompleks dan menuntut strategi pembelajaran serta peran sosial yang lebih luas.

Berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak memotret persoalan guru PAI secara umum di wilayah urban atau mayoritas muslim. Misalnya, studi oleh Ismail (2018) dan Fathurrahman (2021) menekankan pada minimnya pelatihan pedagogik dan kurangnya dukungan profesional bagi guru PAI, namun belum mengupas tuntas situasi spesifik di wilayah minoritas Kristen. Sementara itu, Nurhasanah (2020) dalam penelitiannya di Nusa Tenggara Timur menyatakan bahwa keterbatasan sarana ibadah dan tidak adanya komunitas belajar sesama guru PAI menyebabkan rendahnya inovasi dalam pembelajaran. Meski demikian, data tersebut belum dikaji secara mendalam dalam konteks Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Karo.

Lebih lanjut, belum ditemukan studi komparatif yang mengkaji dampak keterbatasan sarana pembelajaran dan minimnya dukungan kelembagaan terhadap hasil belajar siswa muslim di wilayah minoritas dibandingkan wilayah mayoritas. Padahal, kesenjangan ini sangat penting untuk diangkat karena dapat memperlihatkan ketimpangan kualitas pendidikan agama yang dialami oleh siswa muslim di daerah minoritas. Di Kabupaten Karo sendiri, banyak sekolah negeri yang kekurangan sumber belajar Islam, sementara sekolah swasta umumnya dikelola oleh yayasan Kristen, sehingga guru PAI bekerja dalam kondisi yang kurang ideal.

Selain itu, kebijakan pendidikan yang selama ini diterapkan bersifat seragam dan belum sepenuhnya mempertimbangkan keragaman konteks sosial-keagamaan antarwilayah. Minimnya data evaluatif dari pemerintah atau lembaga pendidikan terkait efektivitas guru PAI di daerah minoritas menyebabkan isu ini kurang mendapat perhatian. Jika tidak segera ditangani secara sistematis, situasi ini dikhawatirkan dapat memperdalam kesenjangan pemahaman keislaman pada generasi muda muslim yang hidup di daerah minoritas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi guru PAI dalam pembelajaran di sekolah dasar negeri pada wilayah minoritas muslim, khususnya di Kecamatan Tiganderket dan Payung, Kabupaten Karo. Penelitian ini secara spesifik akan mengkaji hambatan yang dihadapi guru PAI dalam aspek sarana, dukungan kelembagaan, dan pengembangan profesional; peran sosial-keagamaan guru PAI di luar ruang kelas dalam komunitas minoritas; serta dampak dari keterbatasan tersebut terhadap kualitas pembelajaran dan motivasi belajar siswa. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan kebijakan pendidikan agama Islam yang lebih kontekstual, responsif, dan inklusif terhadap realitas sosial-keagamaan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di dua kecamatan di Kabupaten Karo, yaitu Kecamatan Tiganderket dan Kecamatan Payung, dengan melibatkan total 14 sekolah dasar negeri yang memiliki guru Pendidikan Agama Islam (PAI) aktif. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan beberapa kriteria inklusi, yaitu sekolah berada di lingkungan masyarakat mayoritas non-Muslim, memiliki guru PAI yang aktif mengajar, dan dapat diakses untuk kegiatan observasi serta wawancara mendalam. Adapun kriteria eksklusi adalah sekolah yang tidak memiliki guru PAI definitif atau guru yang sedang cuti panjang. Pemilihan dua kecamatan ini didasarkan pada tingkat keberagaman agama yang tinggi serta rendahnya populasi Muslim, yang menjadikan daerah tersebut representatif secara kontekstual untuk mengkaji dinamika pembelajaran PAI di lingkungan minoritas. Selain itu, keterlibatan peneliti dalam kegiatan KKG/MGMP PAI di dua kecamatan tersebut memudahkan proses pengumpulan data dan memperkuat hubungan sosial dengan responden.

Subjek dalam penelitian ini adalah guru-guru PAI yang mengajar di 14 sekolah dasar negeri tersebut. Responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria tambahan seperti keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran dan aktivitas keagamaan sekolah. Profil responden menunjukkan bahwa mereka berusia antara 28 hingga 55 tahun, dengan pengalaman mengajar bervariasi dari 3 hingga 25 tahun. Seluruh guru memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 Pendidikan Agama Islam, dan dua orang di antaranya sedang menempuh studi pascasarjana. Status kepegawaian guru terdiri dari guru PNS dan non-PNS yang secara tetap bertugas di sekolah tempat penelitian. Profil ini penting untuk melihat bagaimana pengalaman dan latar belakang pendidikan memengaruhi strategi serta persepsi mereka dalam mengajar di lingkungan dengan mayoritas non-Muslim.

Untuk menjamin reliabilitas data kualitatif, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Seluruh wawancara direkam (dengan persetujuan responden), kemudian ditranskrip secara verbatim. Analisis data dilakukan melalui proses pengkodean oleh dua peneliti secara independen untuk meningkatkan keandalan hasil interpretasi. Hasil pengkodean dibandingkan, dan perbedaan ditelaah hingga tercapai kesepakatan bersama, guna memastikan konsistensi temuan (inter-rater reliability). Sementara itu, observasi dilakukan menggunakan lembar observasi sistematis berdasarkan indikator yang dikembangkan dari literatur, serta dilakukan secara berulang untuk melihat konsistensi perilaku dan dinamika pembelajaran yang terjadi.

Triangulasi diterapkan untuk meningkatkan validitas data, yang mencakup triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari guru PAI, kepala sekolah, dan jika memungkinkan, siswa. Triangulasi teknik dilakukan dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi langsung proses pembelajaran, serta dokumentasi seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), foto kegiatan keagamaan, dan arsip laporan sekolah. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan data pada beberapa waktu yang berbeda, seperti sebelum dan sesudah kegiatan keagamaan di sekolah, untuk menguji konsistensi temuan. Sebagai contoh konkret, pernyataan guru mengenai sulitnya

pelaksanaan kegiatan keagamaan diperkuat dengan observasi terhadap tidak tersedianya ruang ibadah serta ketiadaan aktivitas keagamaan dalam dokumentasi sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dasar dengan mayoritas peserta didik non-Muslim menghadapi kondisi sosial yang pada dasarnya kondusif dan relatif harmonis. Hal ini tercermin dari tingginya tingkat toleransi yang terbangun baik di lingkungan guru maupun antar siswa. Misalnya, di SDN 043939 Kutagaluh, kepala sekolah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan aktivitas keagamaan siswa Muslim dengan menyediakan ruang salat yang layak dan memungkinkan pelaksanaan peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi dan Isra' Mi'raj. Tidak hanya itu, pelaksanaan buka puasa bersama yang dihadiri oleh guru dan warga sekolah yang non-Muslim menjadi bentuk nyata adanya interaksi lintas agama yang positif dan saling menghargai. Toleransi ini bukan hanya hadir dalam bentuk sikap pasif (tidak menghalangi), tetapi juga dalam bentuk dukungan aktif terhadap ekspresi keberagaman siswa minoritas. Fenomena ini sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan multikultural sebagaimana dikemukakan oleh James A. Banks (2004), yang menekankan pentingnya kesetaraan, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman dalam ruang pendidikan formal.

Namun demikian, tingkat toleransi tinggi yang tercermin dalam interaksi sosial sehari-hari belum sepenuhnya menjawab tantangan struktural dan pedagogis yang dihadapi guru PAI. Salah satu temuan penting yang patut disoroti adalah komposisi siswa Muslim yang sangat minoritas. Sebagai contoh, di SDN 040490 Batukarang, dari total 54 siswa, hanya terdapat 8 siswa yang beragama Islam. Proporsi yang kecil ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembelajaran PAI. Guru seringkali harus menggabungkan siswa lintas kelas, bahkan dari tingkat yang berbeda, untuk memaksimalkan waktu dan sumber daya. Dalam beberapa kasus, pembelajaran agama dilakukan di luar jam efektif, seperti sore hari setelah pulang sekolah, karena tidak ada jam khusus yang disediakan untuk mata pelajaran PAI pada jadwal resmi sekolah. Situasi ini tidak hanya menghambat efektivitas pembelajaran, tetapi juga mencerminkan kurangnya integrasi sistemik antara pendidikan agama dan kurikulum sekolah di lingkungan multikultural. Teori identitas sosial (Tajfel & Turner, 1986) memberikan pemahaman bahwa kelompok minoritas kerap menghadapi kesulitan dalam mengaktualisasikan identitas kolektifnya jika tidak didukung oleh struktur yang memungkinkan mereka merasa aman dan dihargai.

Tantangan lain yang ditemukan adalah keterbatasan jumlah guru PAI di sekolah-sekolah tersebut. Beberapa guru harus mengajar di lebih dari satu sekolah (merangkap), bahkan ada sekolah yang tidak memiliki guru PAI tetap. Akibatnya, pembelajaran agama menjadi tidak konsisten dan kurang terpantau secara optimal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kesenjangan dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keislaman oleh siswa Muslim. Dalam konteks manajemen pendidikan multikultural, hal ini mencerminkan kurangnya perencanaan yang berbasis pada kebutuhan spesifik kelompok minoritas. Seharusnya, sistem pendidikan mampu mengakomodasi keberagaman dengan menerapkan strategi manajemen konflik yang adaptif, seperti

pendekatan collaborative conflict management (Deutsch, 2000), di mana perbedaan agama dan budaya dijadikan dasar untuk membangun komunikasi, bukan hambatan.

Meskipun menghadapi keterbatasan, guru PAI menunjukkan bentuk agency yang kuat dalam menjalankan perannya sebagai pendidik sekaligus tokoh agama di lingkungan masyarakat. Banyak guru yang tetap aktif mengajar ngaji di rumah-rumah, menjadi pembina kelompok pengajian, hingga terlibat dalam kegiatan sosial keagamaan komunitas Muslim setempat. Dalam konteks teori agency menurut Emirbayer dan Mische (1998), guru PAI telah menunjukkan kapasitas untuk bertindak secara reflektif dan kreatif dalam merespons tantangan struktural. Mereka tidak hanya bekerja berdasarkan perintah institusi, tetapi juga membentuk ruang-ruang alternatif di luar sekolah untuk memastikan pendidikan agama tetap berjalan. Kegiatan ini sekaligus membangun modal sosial (social capital) yang kuat dalam komunitas Muslim minoritas, sebagaimana dijelaskan oleh Putnam (2000), bahwa jaringan sosial, nilai bersama, dan kepercayaan menjadi fondasi penting dalam memperkuat daya tahan komunitas.

Namun demikian, kontribusi guru PAI dalam masyarakat belum sepenuhnya mendapat pengakuan formal dari lembaga pendidikan. Peran mereka lebih banyak berlangsung di ruang informal dan tidak tercatat sebagai bagian dari beban kerja profesional yang diakui. Padahal, keberadaan mereka sebagai aktor sosial dan kultural sangat penting dalam menjaga kohesi sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Hal ini menunjukkan bahwa sistem manajemen pendidikan belum sepenuhnya menerapkan pendekatan holistik dalam memetakan fungsi dan tanggung jawab guru agama di wilayah multikultural. Perlu ada strategi penguatan kapasitas dan peran guru PAI secara institusional agar tidak hanya berperan sebagai penyampai materi ajar, tetapi juga sebagai fasilitator dialog antaragama dan penjaga nilai-nilai toleransi.

Lebih jauh, belum ditemukan upaya konkret dari sekolah untuk mengembangkan program-program pendidikan lintas agama atau dialog antariman yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang agama. Toleransi yang terjadi masih bersifat interpersonal dan belum terstruktur dalam program pedagogis. Dalam pandangan Banks (2004), pendidikan multikultural idealnya tidak hanya sebatas pada sikap menghargai perbedaan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial dalam kurikulum, praktik pembelajaran, dan kebijakan sekolah. Dalam konteks ini, sekolah-sekolah di daerah penelitian masih memiliki ruang untuk berkembang, terutama dalam menciptakan sistem yang mendorong dialog lintas agama sebagai bagian dari proses pembelajaran.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mengungkap bahwa meskipun secara sosial terdapat tingkat toleransi yang tinggi di sekolah-sekolah mayoritas non-Muslim, tantangan tetap muncul dalam bentuk keterbatasan struktural, ketidakterpenuhannya formasi guru PAI, serta belum optimalnya pengintegrasian nilai-nilai multikultural dalam kebijakan dan praktik pendidikan. Guru PAI telah menunjukkan peran yang signifikan sebagai agen sosial, namun diperlukan dukungan sistemik dari lembaga pendidikan agar peran tersebut lebih optimal dan berdampak luas. Diperlukan reformasi manajemen berbasis multikultural dan inklusi nilai lintas agama dalam kebijakan sekolah agar pendidikan agama tidak hanya menjadi ruang afirmasi identitas, tetapi juga menjadi jembatan dialog dan kohesi sosial dalam masyarakat yang majemuk.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat sejumlah rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan secara lebih spesifik untuk memperkuat peran dan efektivitas guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dasar negeri wilayah minoritas Muslim, khususnya di Kabupaten Karo. Untuk menjawab tantangan profesional dan sosial yang dihadapi guru PAI, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama disarankan menyelenggarakan pelatihan yang kontekstual dan berorientasi pada realitas lapangan. Pelatihan tersebut tidak hanya berfokus pada penguatan metodologi pembelajaran PAI, tetapi juga mencakup pendidikan multikultural, manajemen konflik, dan strategi membangun komunikasi lintas iman yang efektif. Selain itu, penguatan sumber belajar perlu dilakukan dengan mengembangkan bahan ajar yang kontekstual, seperti modul berbasis nilai-nilai Islam yang dikaitkan dengan pengalaman siswa sebagai minoritas, media digital interaktif yang responsif terhadap kebutuhan psikososial siswa, serta bahan ajar kolaboratif yang disusun bersama komunitas Muslim lokal.

Di samping itu, kolaborasi antar guru lintas agama perlu difasilitasi secara terstruktur dalam bentuk forum diskusi rutin, kegiatan lintas budaya, serta proyek bersama yang menumbuhkan nilai universal seperti saling menghargai, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan solidaritas antar guru, tetapi juga memperkuat praktik toleransi dalam lingkungan sekolah. Penguatan kapasitas guru juga dapat dilakukan melalui komunitas profesional seperti KKG atau MGMP yang berfokus pada konteks wilayah minoritas, sehingga menjadi ruang refleksi dan pertukaran praktik baik secara berkelanjutan. Dalam waktu yang sama, insentif tambahan serta pendampingan psikososial bagi guru PAI di wilayah minoritas menjadi penting untuk menjaga motivasi dan ketahanan mereka dalam menjalankan peran yang bersifat multidimensional, baik sebagai pendidik, pemimpin spiritual, maupun penggerak komunitas.

Namun, perlu disadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Posisi peneliti sebagai bagian dari komunitas Muslim Karo dapat memunculkan bias interpretatif, terutama dalam memahami relasi antaragama di lingkungan sekolah. Di sisi lain, keterbatasan jumlah informan dan lokasi penelitian yang hanya mencakup beberapa sekolah juga membuat hasil temuan ini belum bisa digeneralisasikan secara luas ke konteks minoritas lain. Waktu penelitian yang relatif singkat turut membatasi eksplorasi terhadap dinamika pembelajaran PAI secara longitudinal. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan studi lanjutan yang bersifat komparatif antara guru PAI di wilayah minoritas Muslim dengan guru agama lain di wilayah minoritas non-Muslim. Penelitian etnografi pendidikan dengan pendekatan jangka panjang juga dapat membantu memperdalam pemahaman terhadap strategi adaptif yang dibangun dalam situasi pluralistik. Lebih lanjut, pengembangan instrumen evaluasi kinerja guru PAI yang mempertimbangkan konteks sosial dan kultural minoritas diperlukan agar proses asesmen lebih adil dan relevan terhadap realitas yang dihadapi di lapangan.

REFERENSI

Arikunto, S. (2000). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Azwar, S. (2004). Metode penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Banks, J. A. (2009). Diversity and citizenship education: Global perspectives. Jossey-Bass.
- Banks, J. A. (2013). An introduction to multicultural education (5th ed.). Boston: Pearson Education.
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2009). Rekonstruksi pendidikan Islam: Dari paradigma pengembangan, manajemen kelembagaan, kurikulum hingga strategi pembelajaran. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyana, D. (2004). Metodologi penelitian kualitatif: Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya.